

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI SELATBARU KABUPATEN BENGKALIS

By : Shintarani Berkahti
shintaraniberkahti@gmail.com
Supervisor : Dr. Khairul Anwar. M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

implementation of government policies Department of Tourism Culture Youth and Sports Bengkalis in the development of nautical tourism , there are several policies which are less effective and efficient so that the beach Selatbaru Not widely known outside the community and infrastructure conditions in Turkish Selatbaru very minimal . Based on data from the Department of Tourism Bengkalis Restra marine tourism development has been set based on a matrix of four kawasan.perumusan the subject matter of this research is how the implementation of development programs Bengkalis Selatbaru coast , so the purpose of this study was to determine how the development of nautical tourism conducted by the Department of Tourism .

This research is a qualitative descriptive method . This research was conducted through observation, in-depth interviews and documentation . And data analysis techniques performed by illustrating and describing and grouping the data according to the type of data . The results of this study indicate that the efforts made by the Department of Tourism Bengkalis in the field of optimal development of nautical tourism have not been able to explore the potential and manage coastal selabaru so no levy generated by Selatbaru beach in revenue accounted Bengkalis .

Keywords : Implementation of policy , government , development , beach Selatbaru

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kegiatan pariwisata sebagai kegiatan matarantai yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. Menurut RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bengkalis(2010:1) Kabupaten Bengkalis terletak dalam Wilayah Propinsi Riau yang terdiri dari 8 Kecamatan mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata, karena memiliki posisi yang cukup strategis karena berhadapan langsung dengan selat malaka serta berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan indonesia-malaysia- singapura (IMS-GT) dan indonesia- malaysia- thailand (IMT-GT). Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar untuk di kembangkan, seperti obyek wisata pantai selatbaru, dimana pantai mengandung potensi untuk dikembangan menjadi daerah wisata baik olahraga dan daerah wisata rekreasi. namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang di dukung oleh fasilitas-fasilitas seperti turap penahan gelombang, sehingga terjadi abrasi yang memakan badan jalan, pertunjukan adat ciri khas daerah yang kurang di kembangkan, pemandian hanya satu, sarana transfortasi umum tidak ada, taman safari yang tidak terawat, pendopo peristirahatan Cuma 4 itupun dalam keadaan tidak terawat, perlengkapan pantai seperti pelampung, bananaboat serta sarana prasarana yang lainnya masih sangat minim. Pantai Selatbaru yang berada di Kecamatan Bantan terus dikikis abrasi, khususnya setiap akhir tahun dimana pada musim itu, gelombang yang datang berasal dari Selat Melaka.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Ali Rasyid mengatakan, tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap yang amblas ke laut. Turap yang dibangun dua tahun lalu, sebagian amblas ke laut karena kuatnya gelombang pada akhir tahun yang datang dari Selat Melaka. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengembangan obyek wisata oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2013 adalah :

1. Memanfaatkan posisi strategis dan keunggulan potensi keindahan alam dan kebudayaan setempat
2. Meningkatkan penyediaan prasarana penunjang wisata, baik berupa jaringan transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, akomodasi dan lainnya guna meningkatkan daya tarik obyek wisata, baik terhadap calon investor pengelola maupun wisatawan.
3. Mengintegrasikan pola pengembangan pariwisata dengan cara menciptakan suatu jaringan rute wisata guna mengoptimalkan potensi ekowisata yang ada sekaligus memperpanjang lama tinggal (*length of stay*) para wisatawan
4. Mengarahkan masyarakat setempat agar berpartisipasi aktif dan tidak hanya berperan sebagai obyek pengembangan pariwisata.
5. Melakukan event dan promosi kepariwisataan untuk menarik wisatawan datang berkunjung.
6. Mengundang investor agar dapat menanamkan modalnya untuk menumbuh kembangkan industri pariwisata.

Sumber : RPJMD Dinas Budparpora Kab. Bengkalis, Tahun 2012

Kurang suksesnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis selama ini tidak terlepas dari kurang tepatnya

strategis kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana seperti MCK, penghijauan, pendopo yang mana semua itu merupakan salah satu penunjang daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai Selat Baru. Dari beberapa persoalan permasalahan pengembangan pariwisata pantai Selatbaru sehingga dalam hal ini perlu kita menganalisa bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pantai Selatbaru.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peneliti memberi judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis*"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep dan kerangka konseptual yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini difokuskan di pantai Selatbaru, Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dipilihnya pantai Selatbaru menjadi objek penelitian dan Dinas Pariwisata menjadi subjek penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian, digunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan

mendeskripsikan variabel mandiri. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi partisipatif, *indepth interview*, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. *Indept interview* yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif (menggambarkan dan memaparkan) pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari observeasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PANTAI SELATBARU.

3.1 Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pantai Selatbaru.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini bagai mana pemerintah Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan kebijakan tentang Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan Objek wisata khususnya Objek wisata Pantai dikecamatan Bantan kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata pantai diKecamatan Bantan, sebagai instansi yang memiliki tugas dalam pengembangan wilayah-wilayah yang mempunyai nilai wisata adalah kegiatan promosi tentunya bagian promosi salah satu langkah pengembangan suatu daerah. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 indikator komunikasi yaitu: transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi.

Transmisi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai suatu hal dari Kepala Dinas Pariwisata ke kepala bidang bagian, Dinas pariwisata kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan pantai Selatbaru, transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Pariwisata kepada Pada Kepala Bagian melalui rapat koordinasi antar bidang. Sosialisasi dalam pengembangan pantai Selatbaru kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi secara tidak langsung kepala masyarakat, dilakukan dengan cara sosialisasi secara tidak langsung seperti pemanfaatan pamflet, baliho dan sebagainya, sehingga informasi yang

didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebaiknya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Danas Pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagian serta masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi promosi wisata dalam rangka pengembangan wisata Selatbaru sangat berpengaruh kepada kemampuan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dari sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari lingkup promosi. Model komunikasi Dinas Pariwisata dalam mengkomunikasikan objek wisata Kabupaten Bengkalis meliputi:

1. Promosi dalam bentuk Personal selling, yaitu berkomunikasi langsung tatap muka antara Dinas Kebudayaan Pariwisata kepada wisatawan guna membentuk pemahaman terhadap objek wisata seperti pameran dan event, pameran biasanya diadakan sendiri maupun mengikuti pameran di daerah lain.
2. Iklan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan suatu objek wisata yang ada di Kecamatan Bengkalis khususnya Rupert Utara. Yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan melakukan kunjungan.
3. Direct marketing bauran promosi yang bersifat interaktif, memanfaatkan suatu media iklan untuk menimbulkan respon yang

terukur dan transaksi disemua lokasi, direct marketing komunikasi promosi langsung ditujukan kepada konsumen individual, melalui website.

Model komunikasi dari Dinas Pariwisata dilakukan melalui promosi dalam bentuk personal selling, iklan, direct marketing. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan informasi yang di sampaikan kurang maksimal. Konsistensi komunikasi akan membatu komunikasi yang disampaikan Dinas Pariwisata sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat. Para penerima komunikasi yakni masyarakat juga dapat memahami maksud dan tujuan yang sedang dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan dari pihak Dinas Pariwisata di lapangan. Konsistensi komunikasi dalam promosi pengembangan wisata bahari pantai Selatbaru dilakukan dalam tiap tahunnya seperti pesta pantai dan pembangunan sarana-prasarana.

berdasarkan observasi peneliti informasi yang disampaikan Dinas Pariwisata merupakan salah satu bentuk dari pengembangan wisata bahari ditambah lagi dengan dukungan dari pemerintah daerah, *stakeholder* maupun Dinas terkait sangat berpengaruh dalam kegiatan yang dilakukan. bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis tampak jelas pada perbaikan sarana prasarana dan pembangunan permainan anak-anak.

3.2 Struktur Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Bahari Pantai Selatbaru

Agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab

Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari pantai Selatbaru tidak ada SOP yang khusus mengatur pantai Selatbaru hanya berpedoman berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Analisa peneliti mengenai SOP yang digunakan dalam pengembangan pantai Selatbaru masih kurang efektif karna tidak adanya standar operasi sistem yang khusus dalam pengelolaan pantai selataru. Hal ini mengakibatkan pengembangannya kurang berkembang Program pengembangan pariwisata secara umum sesuai dengan RPJMD. Namun pengembangan pariwisata yang terkhusus pada pantai selatbaru belum ada SOP yang mengaturnya. Pelaksanaannya hanya berdasarkan pada tupoksi dari Dinas Pariwisata.

Menurut Edward III tanggung jawab disebarkan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi fragmentasi ini menyebabkan terjadinya persebaran tanggung jawab diantara badan pelaksana implementasi kebijakan. Seperti yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan wisata bahari Pantai Selatbaru dengan pembagian tugas sesuai dengan standarisasi kemampuan yang dimiliki tiap bidang organisasi.

Informan mengatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari merupakan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari DPRD hingga masyarakat umum. Dan pak eduar juga menambahkan peneliti termasuk pengawas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru karna peneliti meneliti kesesuaian pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang ada.

3.3 Sumber daya yang Terlibat Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pantai Selatbaru.

sektor pariwisata Pantai Selat Baru Kabupaten Bengkalis, orang ataupun organisasi menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam).

Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staf dalam konteks penelitian ini adalah staf dari dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru, staf dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari tenaga honorer.

Pola perekrutan staf belum sesuai dengan kompetensi staf dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, hal ini dapat terjadi karena staf sukarela sudah ada sebelum pengembangan pembangunan sarana-prasarana wisata bahari pantai selatbaru. Berikut adalah jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 15 orang, D3 berjumlah 7 orang, SMA berjumlah 52 orang, SMP berjumlah 10 orang dan SD berjumlah 11 orang total pegawai yaitu 100 orang (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga) Berdasarkan obserfasi peneliti, pengembangan pantai

Selatbaru yang dilakukan oleh staf Dinas Pariwisata yang tidak memiliki latar belakang khusus mengenai pariwisata, membuat kurang optimalnya perencanaan kebijakan dan implemtasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru.

informasi erat hubungannya dengan komunikasi. Komunikasi terjadi karna adanya informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas pariwisata kepada Kepala bidang masing-masing Informasi yang ada dalam implementasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru berupa tata cara pelaksanaan pengembangan wisata, dan hal-hal lainnya dalam pengembangan wisata. Para pelaksana kebijakan yakni Kepala Bidang pariwisata bisa memperoleh informasi dalam tata cara pengembangan melalui kunjungan wisata bahari didaerah lain.

Dinas Pariwisata dapat mengetahui tahap pengembangan wisata bahari di daerah lain melalui sosial media, teman dan bisa langsung mengunjungi pelatihan kepariwisataan di luar daerah. Koordinasi antar Kepala Dinas pariwisata dan Kepala Bidang dalam pengembangan wisata di lakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Seperti *blogspot, email, vidio conference* .

Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dilakukan untuk mengefektifksn waktu tapi mekanisme rapat tetap memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan obserfasi peneliti untuk menjadi tolak ukur pengembangan perlu adanya survei dari daerah lain namun implementasi kebijakan sangat baik dilakukan apabila melaksanakan perumusan informasi pengembangan secara tatap muka (rapat). Dinas kebudayaan pariwisata memiliki wewenang tertentu di bidang masing-

masingnya sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis.

Fasilitas merupakan faktor penting dalam melakukan implementasi kebijakan. Suatu organisasi yang memiliki staf yang cukup dan berkompeten apabila tidak didukung oleh fasilitas yang terbaik maka akan sulit melaksanakan tanggung jawab secara maksimal. Fasilitas yang harus ada dalam implementasi kebijakan pengembangan pantai Selatbaru berupa gedung tempat penyelenggaraan sosialisasi wisata, hal ini dikarenakan agar penerima informasi yaitu masyarakat dapat nyaman dan mengerti dengan baik atas sosialisasi yang diselenggarakan.

Fasilitas yang sangat minim juga dirasakan oleh wisatawan, kesan yang diterima oleh wisatawan sangat penting guna menimbulkan rasa ingin berkunjung kembali sehingga pantai Selatbaru Selalu ramai di kunjungi oleh masyarakat. Dengan fasilitas yang minim dan tidak

Kecendrungan atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pariwisata berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Karna sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal. Oleh karna itu staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki.

Sikap positif yang ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah Kepala Dinas. Sedangkan sifat negatif cenderung malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap perintah Kepala Dinas Pariwisata Disposisi dibagi menjadi 2 bagian yaitu

terawat menjadi nilai kesan tersendiri oleh wisatawan. sarana prasarana yang ada di Pantai Selatbaru masih sangat minim dan rasa sadar masyarakat akan kebersihan masing kurang Jumlah pedagang yang berjualan disekitaran pesisir pantai berjumlah 30 dan fasilitas ini masih dianggap kurang bagi masyarakat.

hasil obserfasi peneliti mengatakan dibalik kawasan pariwisata yang maju pasti ada SDM dan SDA yang berpotensi dibelakangnya, kemampuan staff dan masyarakat serta fasilitas dalam mengembangkan wisata bahari pantai selatbaru sangat dibutuhkan. Dengan fasilitas yang sangat minim peningkatan pengembang witasa sangat jauh dari kata maksimal. Sehingga potensi yang dimiliki pantai Selatbaru belum bisa tergali lebih luas

3.4 Kecendrungan yang dijumpai Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Selatbaru.

penetapan staf dan hambatan yang dijumpai. Penetapan staf yang terjadi di Dinas Pariwisata berdasarkan lulusan Pegawai negeri Sipil pada umumnya, tidak ada keahlian khusus di bidang pariwisata sebagai kriteria masuk dalam Dinas Pariwisata tersebut, sehingga pemahaman bidang pariwisata kurang dimiliki staf. Analisa peneliti bahwa perekrutan staf dilakukan tidak dilakukan berdasarkan keahlian di bidang pariwisata, sehingga pengembangan pantai Selatbaru kurang bejalan, hanya sebatas wacana-wacana pengembangan.

Hambatan yang di Jumpai Pelaksana Kebijakan dalam Pengembaangan Pantai Selatbaru. pengembangan dan pengelolaan Pantai Selatbaru masih kurang

mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah hal ini dapat dilihat dari matriks empat kawasan dan pantai Selatbaru belum dikelola secara baik sehingga belum dapat diasumsi sebagai kawasan wisata yang produktif bagi pendapatan masyarakat dan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut analisa peneliti pengembangan pariwisata pantai Selatbaru yang di jalankan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan masih banyak hambatan-hambatan yang menjadi tugas rumah pemerintah daerah seperti, adanya pemanaham bahwa belum adanya retribusi yang di peroleh dari Pantai Selatbaru menjadi salah satu alasan hambatan pengembangan wisata bahari. Dan seperti fasilitas yang belum memadai, pendanaan hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis saja, kurangnya promosi dan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan pengembangan objek wisata, sarana prasarana penunjang pengembangan objek wisata juga terbatas (pembuangan sampah, MCK masih minim) keamanan dan kenyamanan penguji masih kurang, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan permodalan yang cukup untuk pengembangan pariwisata Pantai Selatbaru, serta Belum adanya investor yang ikut bergabung dalam pengembangan pantai Selatbaru, semua gejala-gejala ini menjadi faktor utama kurang maksimalnya pengembangan pantai Selatbaru.

Berdasarkan obsrvasi peneliti beberapa hambatan yang dihadapi dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan pantai Selatbaru seperti:

1. Rendahnya sadar wisata,

2. Terbatasnya dan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pengembangan wisata bahari,
3. Rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam pengembangan SDM yang dapat merumuskan konsep-konsep pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karekteristik potensi baik alam maupun budaya, yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis.
4. Rendahnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang potensi wisata.
5. Pemahaman pelaku wisata dari dunia indutri atau bisnis mengenai potensi wisata masih rendah. Bahwa adanya pemahaman pariwisata belum memberi keuntungan kepada pemerintah daerah (pemerintah kabupaten).
6. Masih kurangnya jenis produk indutri rumahan sebagai khas daerah, dengan meningkatkan indutri ini maka dapat menarik wisatawan yang berasal dari luar darah.
7. Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap upaya meningkatkan pengalaman wisatawan sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi lagi ataupun memberi rekomendasi positif kepada teman-teman dan keluarga.

Dari kondisi yang telah di jelaskan diatas, hal ini dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan implemntasi kebijakan pengembangan pantai selatbaru agar sesuai dengan Visi Misi dan Restra yang telah direncanakan. Karna dikhawatirkan ada kesalahan kecil yang dapat

memberikan dampak besar namun tidak terlihat oleh pemimpin.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori Edwards III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang implementasi kebijakan pemerintah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan wisata bahari terdapat beberapa implementasi kebijakan yang kurang efektif dan efisien seperti yang telah peneliti jabarkan dalam bab III. Masalah-masalah yang dianggap kecil dalam birokrasi pemerintah kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan wisata bahari di pantai Selatbaru kurang berkembang. strategi pengembangan pantai Selatbaru dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (*stakeholder*) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Belum terimplementasinya Program Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis tersebut secara efektif terutama obyek wisata yang ada dikecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis seperti Objek wisata pantai Selatbaru, karena belum adanya investor yang tertarik menanamkan modal dalam pengembangan pantai Selatbaru dan belum begitu dikenal luas oleh orang luar daerah Kabupaten Bengkalis dan tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan yang berdampak pada jumlah pengunjungnya yang relatif sedikit dan daerah sekitar saja .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. 2010. *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis*
- Anonim. 2013. *Bengkalis Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Anonim. 2010. *Panduan EYD dan Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta : Redaksi transmedia
- Anwar saiful. 2004. *Sendi sendi hukum administrasi negara*. Glora Madani Press
- Budi winarno.2002. *kebijakan publik teori dan proses*. Edisi revisi. Yogyakarta: Media presindo
- Budiardjo miriam.2010. *Dasar dasar ilmu politik*. Jakarta. PT gramedia
- Emir .2012. *metodelogi penelitian kualitatif analisis data*.jakarta: Rajawali Pers.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- M.irfan islamy.1992. *Perinsip perinsip perumusan kebijaksanaan*.jakarta: Bumi aksara
- M. Manulung. 1995. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha taliziduhu. 2010. *Metode ilmu pemerintahan*. Jakarta: Renika Cipta

Soekadijo. 2000. *Anatomi pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*, Pekanbaru, Alaf Riau

Tangkilisan.2003. *Kebijakan dan menejemen otonomi daerah*. Yogyakarta: lukman ofset

Artikel

Fokus Riau. Com. 2014. 10.02. *Turap pantai selatbaru kembali di kerjakan*.

Riau terkini. 2012.12.02. *Abrasi Semakin Memprihatinkan Warga Bengkalis Sayangnya Proyek Penahan Gelombang Selatbaru Tak Tuntas*.

<http://depbudpar.com>

[http// Kabupaten Bengkalis, statis-22-objekwisata.html](http://KabupatenBengkalis.com)

Karya Ilmiah

Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau, natuna, *pembangunan dan otonomi daerah*. (pekanbaru 1996)

Jurnal Administrasi Bisnis FIA Universitas Brawijaya Malang, *Perumusan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pengusaha Kecil Bidang Pariwisata dengan Analisis Hirarki Prioritas*.(malang 2009)

Kartini La Ode Unga. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*. (Makasar 2011)

Mariska Meidila. *Aktifitas promosi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten wakatobi dalam meningkatkan kunjungan wisata wakatobi sulawesi tenggara*. (makasar 2014)

Timang Setyorini, *Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang*. (Semarang. 2004)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No.32 Tahun 2004 *Tantang Pemeritahan Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Kepariwisataan*

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 *Tentang Kepariwisataan*.

Undang-Undang Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1992 *Tentang Benda Cagar Budaya*

*Kabupaten Bengkalis Tahun 2008
Nomor 07)*

Undang-Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1993 *Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1992 Tentang Benda Cagar Budaya*

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 13 Tahun 2008 *Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Bengkalis(
Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13)*

Undang-Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 *Tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12
Tahun 2008 *Tentang Tugas Pokok
Dan Fungsi Serta Uraian Tugas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Bengkalis.*

Undang-Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 *Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89)*

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008
*Tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah*